

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO

DILAKSANAKAN BULAN DESEMBER
TAHUN 2020



DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	1
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	2
BAB II	4
METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi Dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	4
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Tahapan pelaksanaan	5
BAB III	8
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	8
3.1. Profil responden	8
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	17
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan.....	19
BAB IV.....	21
PENUTUP	20
4.1. Kesimpulan.....	20
4.2. Rekomendasi.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1-4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparasi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Hadiah
7	Biaya Tambahan
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3
 Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

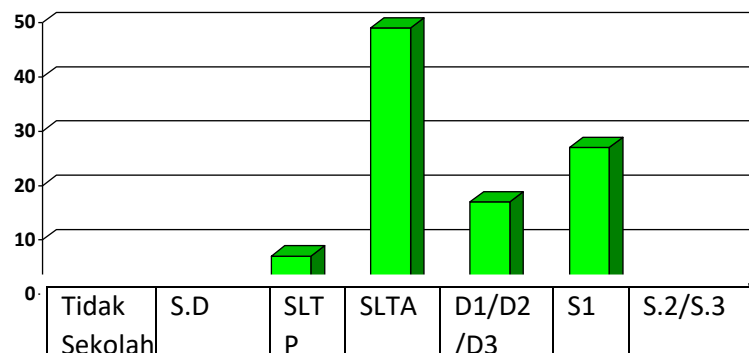
Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto mayoritas memiliki latar Pendidikan Menengah Atas dan Strata 1.

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

No.	Tingkat pendidikan	Frekuensi	
		F	%
1.	Tidak Sekolah	0	0
2.	S.D	0	0
3.	SLTP	7	7
4.	SLTA	49	49
5.	D1/D2/D3/D4	17	17
6.	S.1	27	27
7.	S.2/S.3	0	0
Jumlah		100	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



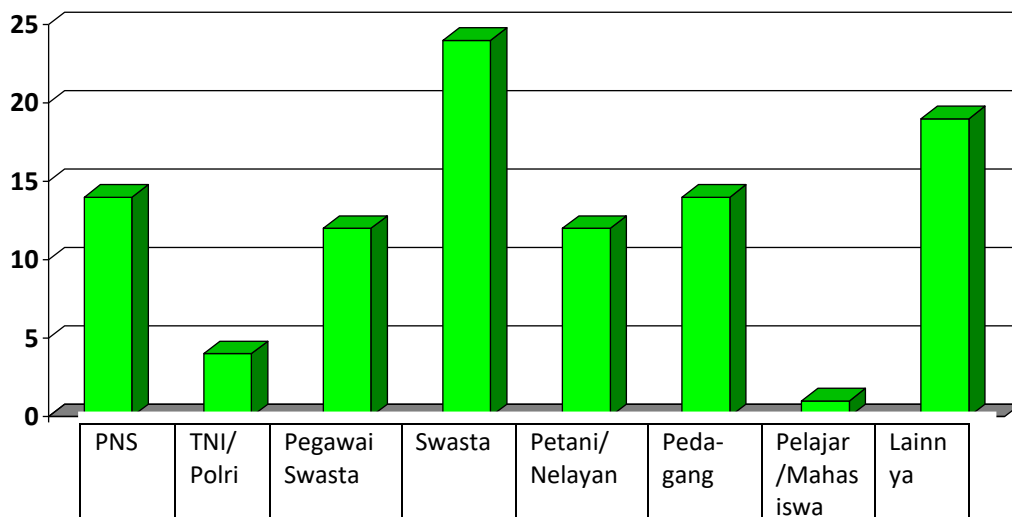
3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 24% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto memiliki pekerjaan di sektor swasta.

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden

No.	Jenis pekerjaan	Frekuensi	
		F	%
1.	PNS	14	14
2.	TNI/Polri	4	4
3.	Pegawai Swasta	12	12
4.	Swasta	24	24
5.	Petani/ Nelayan	12	12
6.	Pedagang	14	14
7.	Pelajar/Mahasiswa	1	1
8.	Lainnya	19	19
Jumlah		100	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.1.3. Domisili responden

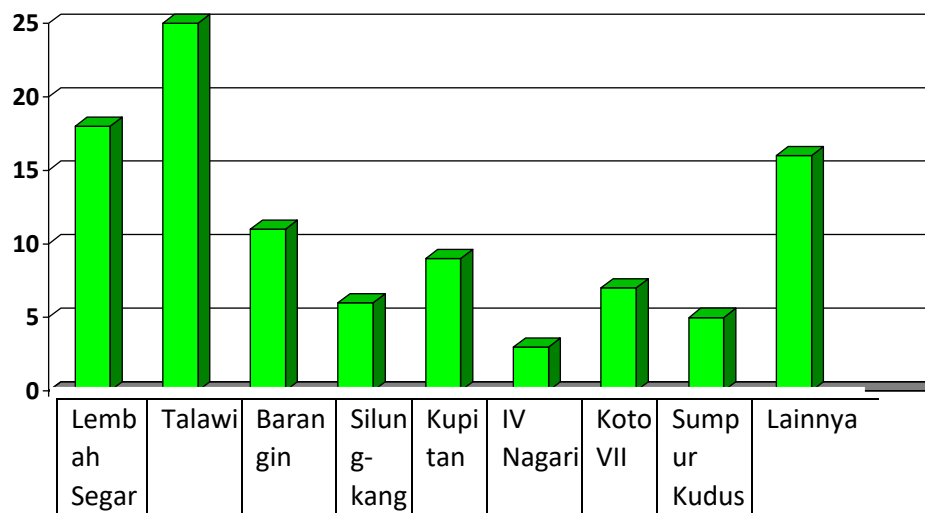
Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili menurut pengelompokan per Kecamatan, responden paling banyak berasal dari kecamatan Talawi dengan 25%.

Tabel 6
Domisili Responden

No.	Domisili responden per Kecamatan	Frekuensi	
		F	%
1.	Lemah Segar	18	18
2.	Talawi	25	25
3.	Barangin	11	11

4.	Silungkang	6	6
5.	Kupitan	9	9
6.	IV Nagari	3	3
7.	Koto VII	7	7
8.	Sumpur Kudus	5	5
9.	Lainnya	16	16
Jumlah		100	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.1.4. Kelompok usia responden

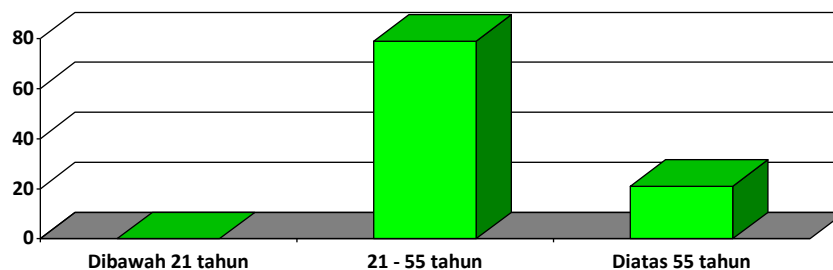
Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 21 tahun s/d 55 tahun. Bagi kelompok usia di atas 55 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 21 tahun.

Tabel 7.

Usia responden

No.	Usia responden	Frekuensi	
		F	%
1.	Dibawah 21 tahun	0	0
2.	Antara 21-55 tahun	79	79
3.	Diatas 55 tahun	21	21
Jumlah		100	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.1.5. Layanan yang digunakan

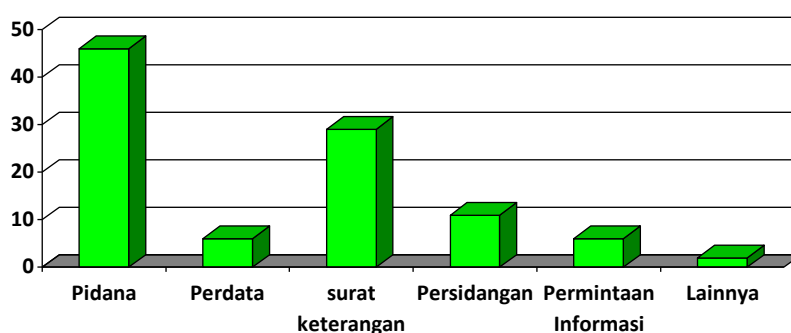
Layanan dalam perkara pidana menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh responden, yaitu sebesar 46%.

Tabel 8.

Jenis layanan yang dipergunakan responden

No.	Jenis layanan	Frekuensi	
		F	%
1.	Pidana	46	46
2.	Perdata	6	6
3.	Surat Keterangan	29	29
4.	Persidangan	11	11
5.	Permintaan Informasi	6	6
6.	Lainnya	2	2
Jumlah		100	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,98.

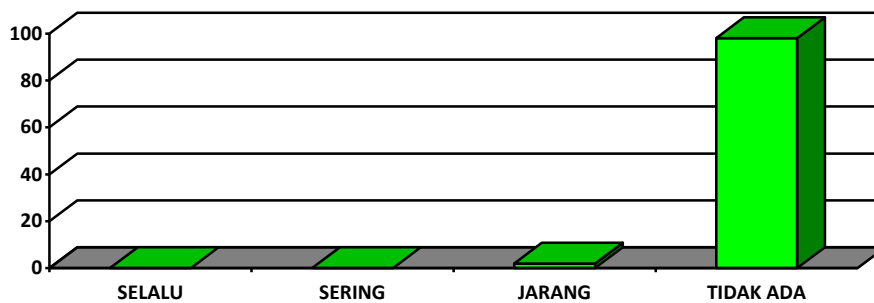
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto secara umum bersih dari Manipulasi Peraturan.

Tabel 9.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No.	manipulasi peraturan	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	-	-
2.	Sering	-	-
3.	Jarang	2	2
4.	Tidak pernah	98	98
Jumlah		100	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3,94.

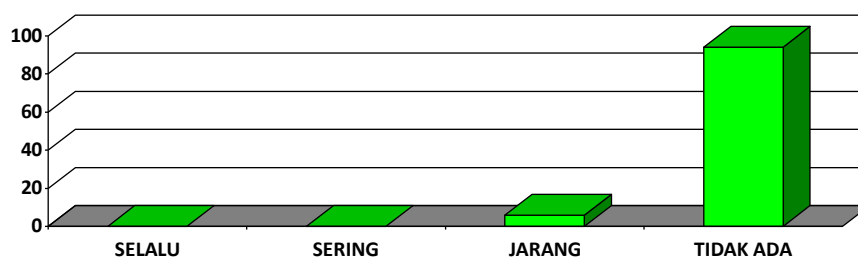
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 10.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No.	penyalahgunaan jabatan	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	-	-
2.	Sering	-	-
3.	Jarang	6	6
4.	Tidak pernah	94	94
Jumlah		100	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

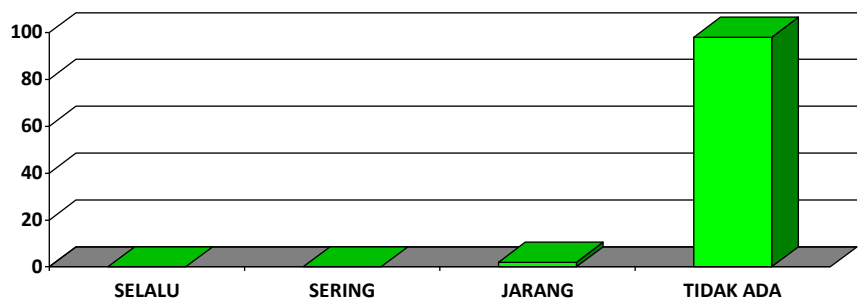
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,98.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto bersih dari Menjual Pengaruh

Tabel 11.
Indeks pada indikator menjual pengaruh

No.	Menjual pengaruh	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	-	-
2.	Sering	-	-
3.	Jarang	2	2
4.	Tidak pernah	98	98
Jumlah		100	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

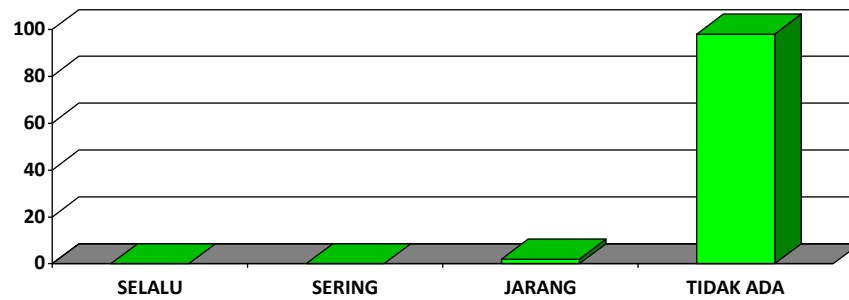
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,98.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto telah adanya Transparansi Biaya

Tabel 12.
Indeks pada indikator transparansi biaya

No.	Transparansi biaya	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	-	-
2.	Sering	-	-
3.	Jarang	2	2
4.	Tidak pernah	98	98
Jumlah		100	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,91.

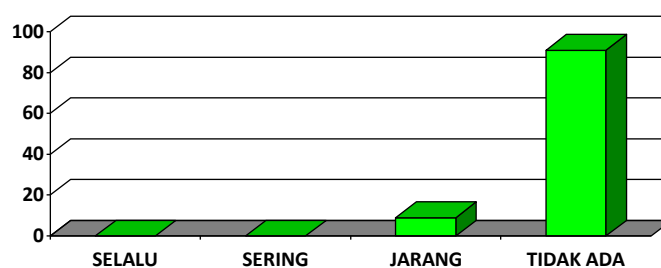
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto bebas dari Biaya tambahan.

Tabel 14.

Indeks pada indikator tambahan biaya

No.	Tambahan biaya	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	-	-
2.	Sering	-	-
3.	Jarang	9	9
4.	Tidak pernah	91	91
Jumlah		100	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.2.6. Indikator Hadiah

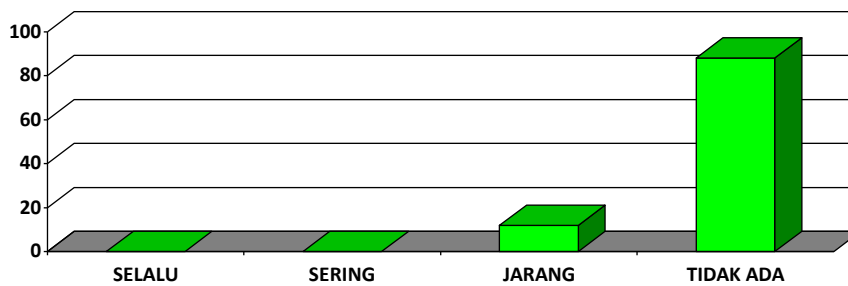
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,88.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto secara umum bersih dari menerima hadiah.

Tabel 15.
Indeks pada indikator hadiah

No.	Pemberian hadiah	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	-	-
2.	Sering	-	-
3.	Jarang	12	12
4.	Tidak pernah	88	88
Jumlah		100	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 4,00.

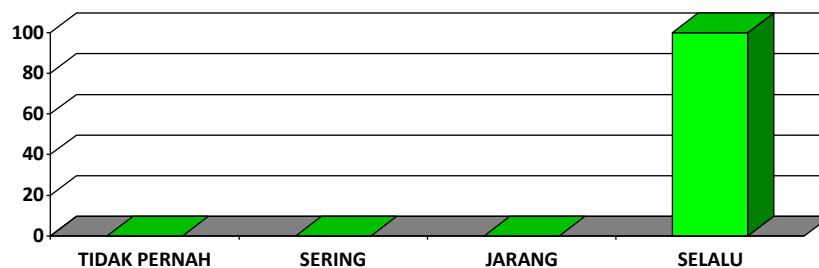
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto telah adanya transparansi pembayaran.

Tabel 16.

Indeks pada indikator transparansi pembayaran

No.	Transparansi pembayaran	Frekuensi	
		F	%
1.	Tidak pernah	-	-
2.	Jarang	-	-
3.	Sering	-	-
4.	Selalu	100	100
Jumlah		100	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.2.8. Indikator Percaloan

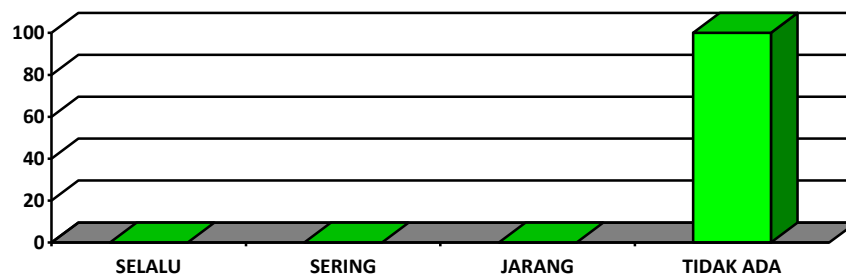
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 17.

Indeks pada indikator percaloan

No.	Percaloan	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	-	-
2.	Sering	-	-
3.	Jarang	-	-
4.	Tidak pernah	100	100
Jumlah		100	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4,00.

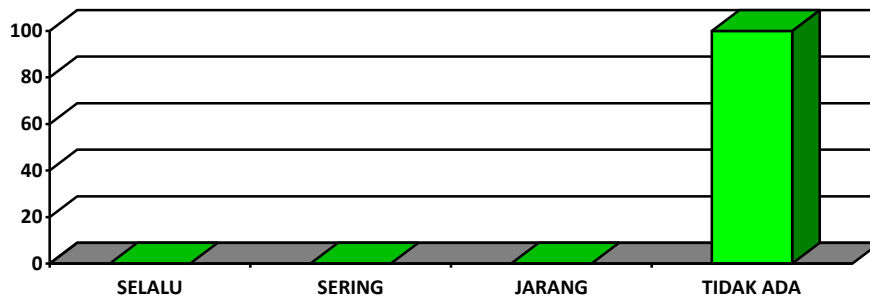
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto

Tabel 18.

Indeks pada indikator perbuatan curang

No.	Perbuatan curang	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	-	-
2.	Sering	-	-
3.	Jarang	-	-
4.	Tidak pernah	100	100
Jumlah		100	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4,00.

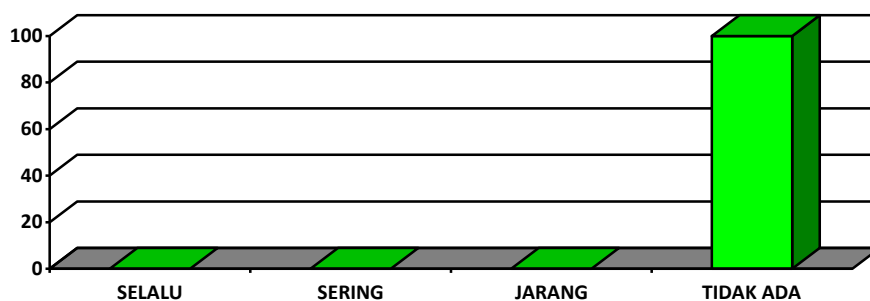
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto

Tabel 18.

Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

No.	Perbuatan curang	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	-	-
2.	Sering	-	-
3.	Jarang	-	-
4.	Tidak pernah	100	100
Jumlah		100	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sawahlunto sebesar 3,97.

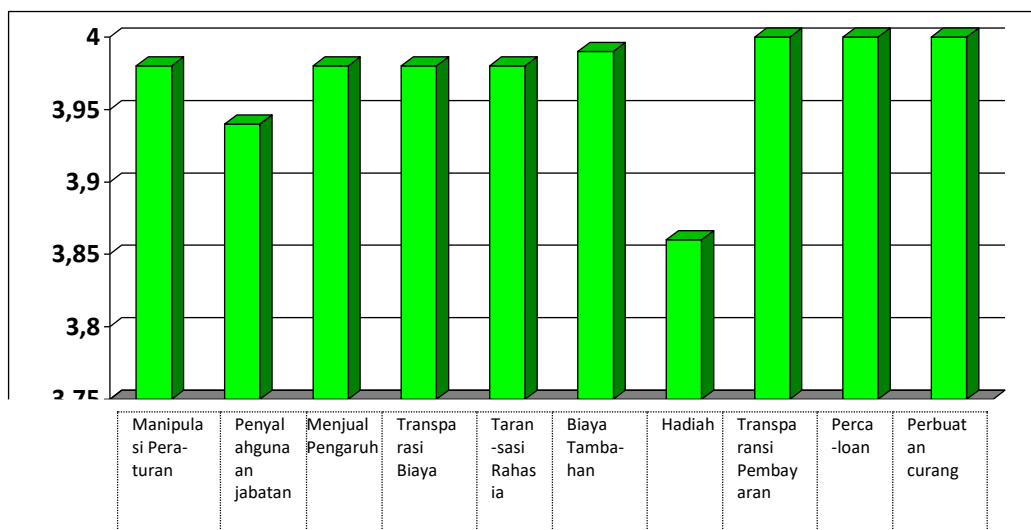
Tabel 19.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Indeks 3,97 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut berada antara IPK 3.26 – 4.00 maka masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 3,97.

No.	Indeks Persepsi Korupsi	Jumlah
1.	Manipulasi Peraturan	3,98
2.	Penyalahgunaan jabatan	3,94
3.	Menjual Pengaruh	3,98
4.	Transparansi Biaya	3,98
5.	Transaksi Rahasia	3,99
6.	Hadiah	3,88
7.	Biaya Tambahan	3,91
8.	Transparansi Pembayaran	4,00
9.	Percaloan	4,00
10.	Perbuatan curang	4,00

Dengan Grafik sebagai berikut:



Tabel 20.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25.00 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21.

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto
1	Sudah tidak ada lagi pembayaran tanpa kwitansi;
2	Setiap pembayaran ada bukti pembayarannya;
3	
4	
5	

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sawahlunto diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Sawahlunto memiliki Indeks Persepsi Korupsi tidak ada atau masuk pada kategori bersih dari korupsi

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,98.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,94.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,98.
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,98.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,99
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,88.
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,91
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,00.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,00.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Negeri Sawahlunto Tahun 2020 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks 3,97 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator hadiah memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
63	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
65	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
71	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
72	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
77	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
84	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
87	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
93	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	398	394	398	398	399	388	391	400	400	400	
N.Rata-rata	3.98	3.94	3.98	3.98	3.99	3.88	3.91	4.00	4.00	4.00	
											1
NRR Tertimbang	0.40	0.39	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	3.97
											10
											0.1

Keterangan :

- Q1 - Q10 : Unsur-unsur Pertanyaan
- NRR** : Nilai Rata-rata
- IPK : Indeks Persepsi Korupsi
- *)** : Jumlah NRR IPK Tertimbang
- NRR Per Unsur : Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi

IPK : 3.97

NILAI INDEKS
Total Nilai Persepsi Per Kuesioner/
Total Unsur Yang Terisi
Jumlah Responden
Bobot
Unsur Pertanyaan
Bobot NRR Tertimbang

Nilai Interval IPK	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	2	3	4
1,00-1,75	25,00-43,75	1	Selalu
1.76-2.50	43.76-62.50	2	Sering
2,51-3,25	62,51-81,25	3	Jarang
3,26-4,00	81,26-100,00	4	Tidak Ada

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata
Q 1	Manipulasi Data	3.98
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	3.94
Q 3	Menjual Pengaruh	3.98
Q 4	Tranparansi Biaya	3.98
Q 5	Biaya Tambahan	3.99
Q 6	Hadiah	3.88
Q 7	Transaksi Biaya	3.91
Q 8	Percaloan	4.00
Q 9	Perbuatan Curang	4.00
Q 10	Transaksi Rahasia	4.00
		39.7